

BAB IV

KESIMPULAN

Pendidikan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sejak belum bernama Indonesia. Pemberian pendidikan sejatinya adalah sebuah keharusan bagi manusia, sebab melalui pendidikan manusia mampu membangun peradaban dan menciptakan pengetahuannya sendiri. Pendidikan tidak pernah terlepas dari sebuah elemen bernama politik. Pandangan politik akan selalu berpengaruh terhadap pendidikan dan guna menjalankan fungsi pendidikan diperlukan aturan serta regulasi yang diproduksi lewat politik.

Bangkitnya nasionalisme di Asia dan perubahan peta politik di negeri Belanda membuat pemerintahan kolonial Belanda kembali mengubah politiknya, politik etis diberlakukan di Indonesia dan pemerintah dengan resmi memperbanyak sekolah. Di tahun sebelum politik etis telah ada sekolah yang berdiri, namun sekolah itu sifatnya sangat kecil dan lebih untuk mengisi posisi administratif di perkebunan dan kantor-kantor Belanda. Di tahun-tahun pelaksanaan politik etis bukan berarti pendidikan tidak diarahkan kepada pemberdayaan di kantor-kantor pemerintah dengan harga murah, melainkan kesempatan untuk mengenyam lebih terbuka meskipun dengan berbagai halangan dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

Keadaan inilah yang menjadikan Suwardi Suryaningrat dan tokoh pergerakan lainnya resah, lewat serangkaian tindakan yang dianggap melawan

pemerintah akhirnya membuat Suwardi dibuang ke Belanda. Sekembalinya dari pembuangan, ia mendirikan Taman Siswa sebagai wadah untuk mengimplementasikan gagasannya dan mewujudkan cita-citanya. Pendirian Taman Siswa adalah cara lain dari Suwardi mewujudkan kemerdekaan. Tentangan dari pemerintah kolonial Belanda mulai terlihat tatkala Taman Siswa semakin besar dan pergerakan nasional semakin terasa dan mengusik pemerintah. Pemerintah secara reaksioner memberlakukan undang-undang pengawasan yang didalamnya terdapat undang-undang pengajaran yang didalamnya melarang adanya sekolah swasta yang tidak didanai dan direstui oleh pemerintah kolonial atau jika menggunakan istilah pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah liar. Penangkapan terhadap tokoh pergerakan nasional yang dianggap berbahaya dilakukan pemerintah untuk menciptakan suasana yang “kondusif”.

Pemberlakuan aturan yang memberatkan Taman Siswa membuat Taman Siswa mengambil kebijakan penting yaitu melakukan perlawanan terhadap undang-undang pengajaran Belanda. Perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan tanpa kekerasan. Sebab, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan mengajarkan tentang kehalusan budi dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Jika melihat corak perlawanan Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi undang-undang pengajaran, maka penulis teringat dengan politik Mahatma Gandhi yang juga mengutamakan anti kekerasan (Ahimsa). Jika saja Taman Siswa mau mengalah dan mengikuti kemauan pemerintah kolonial Belanda, maka Taman Siswa akan mendapat Subsidi. Namun, Taman Siswa

menolak hal tersebut dan tetap berupaya melakukan perlawanan walaupun dengan cara diam sekalipun.

Pamor Taman Siswa terangkat lewat keberaniannya dalam menentang keijakan undang-undang pengajaran hal ini tentu berimbas kepada penyebaran sekolah Taman Siswa yang semakin banyak. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang juga turut membuat Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa mengambil sebuah keputusan penting, yaitu melakukan politik kepompong. Hal ini dimaksudkan adalah bahwa kekuatan Jepang bisa digunakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, sekali lagi keputusan itu bukan tanpa resiko karena imbasnya adalah banyak sekolah Taman Siswa yang tutup disebabkan kebijakan Jepang yang hanya memperbolehkan Taman Tani dan Taman Rini. Fasilitas dan guru yang tidak memadai membuat banyak cabang Taman Siswa tutup termasuk Taman Siswa Jakarta.

Perintah untuk melakukan politik kepompong dari Majelis Luhur kepada seluruh Taman Siswa ternyata tidak disetujui oleh Taman Siswa Jakarta yang menginginkan Taman Siswa Jakarta tetap buka dan melakukan pengajaran. Keputusan ini menjadi perdebatan di kalangan Taman Siswa dan akhirnya Majelis luhur memperbolehkan Taman Siswa Jakarta beroperasi dan menjadi penanggung jawab bagi cabang-cabang Taman Siswa. Keadaan yang seperti ini harus dilakukan Taman Siswa sebagai konsekuensi politik pendidikan yang diambil hingga kekalahan Jepang dari sekutu dan membuat Indonesia bisa merebut serta memproklamkan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia disikapi Taman Siswa dengan berbagai macam sehingga memerlukan diadakannya kongres dan

membahas mengenai eksistensi Taman Siswa ditengah kemerdekaan. Diangkatnya Ki Hajar Dewantara menjadi menteri P, P, dan K adalah salah satu alasan juga bagi Taman Siswa untuk mengambil kebijakan strategis.

Diangkatnya Ki Hajar Dewantara dan tokoh Taman Siswa lain seperti Ali Sastroamidjojo dan Ki Mangunsarkoro menjadi menteri P, P, dan K merupakan bukti bahwa keterlibatan Taman Siswa dan pengaruhnya terhadap pendidikan menjadi semacam pertimbangan untuk mengangkat menteri dari kalangan Taman Siswa. Politik pendidikan yang dilakukan Taman Siswa menjadi sebuah kebijakan yang penting ditengah perubahan dari zaman yang baru dan ditengah zaman dimana banyak perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan Taman Siswa bukan hanya dilakukan dilapangan pendidikan, melainkan juga peperangan karena bagaimanapun tugas mempertahankan kemerdekaan adalah tugas seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan tahun 1947 adalah bukti bahwa Taman Siswa benar-benar melakukan reorientasi gerakan dengan menyusun kembali azas 1922 dan diterjemahkan menjadi dasar 1947. Keputusan itu diambil guna menyikapi perubahan yang terjadi di Indonesia. Sempat menjadi perbincangan bahwa apakah perubahan dari azas 1922 ke dasar 1947 merupakan perubahan arah atau cita-cita Taman Siswa, namun Ki Mangunsarkoro beranggapan bahwa dasar 1947 merupakan sari-sari dari azas 1922 dan itu tidak menyalahi cita-cita Taman Siswa dan terlepas dari perubahan arah memang Taman Siswa harus mengikuti zaman namun tidak terbawa arus zaman. Kebijakan yang cukup menjadi permasalahan kala itu adalah persoalan subsidi, banyak yang menginginkan bahwa Taman

Siswa tetap menolak subsidi dengan asumsi bahwa bagaimanapun subsidi akan mengurangi kemerdekaan seperti kita tahu bahwa Taman Siswa adalah organisasi yang ditahun 1920-an hingga kemerdekaan adalah organisasi yang sangat menolak subsidi. Bukan tidak bisa bahkan Taman Siswa ditawari subsidi. Namun akhirnya selalu menolak bahkan Taman Siswa dengan tegas menentang Muhammadiyah yang kala itu menerima subsidi dari Belanda, namun perubahan zaman akhirnya mempengaruhi kebijakan yang diambil, di R.B.U ke V penerimaan subsidi diperbolehkan bahkan harus diusahakan dengan asumsi bahwa orang-orang yang berada di kementrian P,P, dan K adalah orang-orang Taman Siswa, sehingga kebijakannya tidak akan mengurangi kemerdekaan Taman Siswa. Permintaan Subsidi pun dilakukan guna menjalankan roda organisasi. Tahun 1947 adalah tahun yang penting bagi Taman Siswa karena kebijakan pada ini lebih mengarah kepada reorganisasi dan regenerasi pasca ditinggalnya Taman Siswa oleh orang-orang yang lebih memilih bekerja di lapangan lain diluar Taman Siswa. Regenerasi juga dilakukan untuk membuat Taman Siswa lebih siap dalam menghadapi zaman baru dan mengurangi ketergantungan terhadap Ki Hajar Dewantara yang akan lebih sibuk bekerja di republik Indonesia.

Tahun-tahun berikutnya dalam suasana republik masih berupaya memperoleh pengakuan kedaulatan dan penyelesaian dengan Belanda, meskipun wilayah republik terus menerus namun Taman Siswa masih sanggup bertahan dan tetap melakukan pengajaran. Hal ini disebabkan memang sejak zaman kolonial Taman Siswa sudah mengalami hal serupa. Namun, Taman Siswa terpaksa harus menutup sekolah karena agresi Militer II yang berimbas pada ditutupnya Taman

Siswa, dalam keadaan genting dan darurat perjuangan Taman Siswa kembali mengambil keputusan yang hampir sama seperti yang dilakukan di zaman Jepang.

Bedanya ini lebih tersembunyi dibanding zaman Jepang meskipun begitu pengajaran terus dilakukan walaupun sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan nama Taman Siswa. Puncaknya adalah pada 1950, ketika perjanjian KMB mengeluarkan keputusan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu pula akhirnya lewat R.B.U nya Taman Siswa memutuskan untuk mengikuti pengajaran republik ini menjadi semacam penegasan bahwa Taman Siswa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Indonesia.

Politik pendidikan yang diambil Taman Siswa selalu dibuat di rapat besar ataupun di Rapat Besar Umum yang dilakukan tiga tahun sekali. Pengambilan keputusan di rapat besar umum dimaksudkan agar keputusan yang diambil diketahui semua pihak dan dapat diterima dengan baik, perihal dengan keputusan yang harus diambil sesegera mungkin dan tidak mungkin menunggu rapat besar umum tetap diberikan kepada pemimpin umum Taman Siswa. Menurut Ki Hajar, ini adalah bentuk demokrasi dan kepemimpinan.

Politik pendidikan Taman Siswa di tahun baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan banyak mempengaruhi pendidikan nasional maupun gerakan pada saat itu, namun pasca orde baru mengeluarkan sekolah inpres (instruksi presiden), Taman Siswa hanya menjadi sekolah cadangan bagi anak yang tidak diterima bersekolah di sekolah negeri. Tentu ini menjadi sangat kontras dengan seperti Taman Siswa ditahun sebelumnya yang mana Taman Siswa diminati karena

memang kualitas dan mampu membangun kesadaran yang tinggi akan kebudayaan dan masyarakat. Jika sebelumnya politik pendidikan Taman Siswa mampu berpengaruh hingga ke lingkup nasional, maka hari ini keputusan itu hanya mampu berpengaruh hingga ke lingkup lokal Taman Siswa.

Keterlibatan Taman Siswa dalam PPPKI yang digalang Soekarno mampu memasukan gagasan yang memang sudah lama digunakan Taman Siswa seperti pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bersifat nasional dan subsidi harus dihindari agar kemerdekaan tidak berkurang. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang sudah lama diterapkan dalam pengajaran di Taman Siswa yang memang memiliki kurikulum tersendiri yang berbeda dari kurikulum pemerintah kolonial Belanda waktu itu.

Ki Hajar juga beranggapan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan itu menjadi salah satu pasal dalam undang-undang 1945. Namun, hari ini gagasan Ki Hajar hanya menjadi penghias buku sejarah pendidikan Indonesia, dan tulisan dalam buku-buku Taman siswa. Nyatanya hari ini pendidikan sudah bukan lagi usaha kebudayaan melainkan usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya. Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan yang dibangun untuk menciptakan manusia merdeka pun seakan tenggelam oleh sekolah-sekolah lain dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat seperti yang dilakukan di periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.